

ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIMBUNAN MASKER PADA SAAT PANDEMI VIRUS CORONA DI INDONESIA

ABSTRAK
SUKIRMAN
183311042007

Merebaknya wabah virus corona menyebabkan langkanya masker. Kelangkaan ini terjadi karena adanya penimbunan masker. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) ketentuan hukum positif di Indonesia yang melarang penimbunan masker pada saat pandemi virus Covid-19, 2) penerapan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atas dugaan kejahatan penimbunan masker, 3) upaya penanggulangan kejahatan penimbunan masker untuk menganalisis. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis adalah 1) Ketentuan hukum positif di Indonesia yang melarang penimbunan barang pokok dan barang penting dan ancaman hukuman pada Undang-Undang yang bersifat “umum” tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Nomor: 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, 2) Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan berbentuk keputusan tertulis sebagai kaidah hukum tertulis. Kaidah hukum tertulis dalam penerapan peraturan perundang-undangan atas dugaan kejahatan penimbunan masker oleh penegak hukum dengan menggunakan UU RI Nomor: 7/2014 Tentang Perdagangan. Namun di dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, memiliki kelemahan karena masker tidak tercantum di dalamnya sehingga sangat sulit dilakukan penegakan hukum di pengadilan. 3) Penanggulangan kejahatan penimbunan masker dapat dilakukan melalui jalur penal dan non-penal. Penegak hukum secara penal agar dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan penimbunan masker dengan memberikan ancaman hukuman berpedoman pada Undang-Undang yang bersifat “khusus”, seperti pelanggaran masalah perizinan, pelanggaran izin edar, perlindungan konsumen, pelanggaran praktek monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat, dan peraturan daerah. Pada jalur nonpenal yaitu dengan memberikan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat untuk saling membantu dalam penanganan virus corona dengan tidak menimbun masker. Saran yang diberikan adalah: Undang-undang terhadap pelaku penimbunan masker segera dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 71 tahun 2015, Pasal 2 ayat (7), serta Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan penimbunan masker, sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI No.7/2014.

Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan, Penimbunan Masker, Virus Corona

JURIDICAL ANALYSIS OF MASK COVERAGE CRIME IN PANDEMIC

CORONAVIRUS IN INDONESIA

ABSTRACT

SUKIRMAN

183311042007

The outbreak of the coronavirus caused a scarcity of masks. This scarcity occurs because of the hoarding of masks. The purpose of this research is to find out: 1) positive legal provisions in Indonesia which prohibit the hoarding of masks during the Covid-19 virus pandemic, 2) the application and weakness of laws and regulations regarding the crime of mask hoarding, 3) efforts to combat the crime of hoarding masks for analyzing. The data analysis was done qualitatively by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials related to the research. The results of the analysis are 1) Positive legal provisions in Indonesia which prohibit the stockpiling of basic and essential goods and the threat of punishment in Laws of a "general" nature is stated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and Presidential Regulation Number: 71 of 2015 concerning Stipulation and Storage of Basic Needs and Important Goods, 2) Legislation is a regulation in the form of a written decision as a rule of written law. Written legal principles in the application of statutory regulations on alleged crimes of hoarding masks by law enforcers using the RI Law Number: 7/2014 concerning Trade. However, in its implementation based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number: 71 of 2015 concerning the Stipulation and Storage of Basic Needs and Important Goods, it has weaknesses because masks are not listed in them so that it is very difficult to enforce the law in court. 3) Overcoming the crime of hoarding masks can be done through penal and non-penal channels. Law enforcers are penalized in order to provide a deterrent effect on the perpetrators of mask hoarding crimes by threatening penalties based on "special" laws, such as violations of licensing issues, violation of distribution permits, consumer protection, violations of monopolistic practices, and unfair business competition, and local regulations. In the nonpenal route, namely by providing understanding to all components of society to help each other in handling the coronavirus by not hoarding masks. Suggestions given are: The Minister will immediately issue a law against the perpetrators of mask hoarding based on Presidential Regulation Number: 71 of 2015, Article 2 paragraph (7), and local governments can issue regional regulations to provide a deterrent effect on the perpetrators of mask hoarding crimes, Article 13 paragraph (1) of Law No. 7/2014.

Keywords: Crime Prevention, Mask Hoarding, Coronavirus